

**KETIMPANGAN KEPEMILIKAN E-KTP DALAM PEMBANGUNAN
DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL DIKECAMATAN MUARA
BENGKAL KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Sopiyana, I Ketut Gunawan, Anwar Alaydrus

**eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 11 ,
Nomor 1 , 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul Skripsi : Ketimpangan Kepemilikan E-Ktp Dalam Pembangunan Data Kependudukan Nasional DiKecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur

Nama : Sopiya

NIM : 1502025115

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul.

Pembimbing I



Dr. Phil. I Ketut Gunawan.MA
NIP. 196312221990021001

Samarinda, 04 Januari 2023

Pembimbing II



Dr. Anwar Alaydrus S.Sos.MM
NIP 197102262002121002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN PROGRAM STUDI S1 FISIPOL

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Ilmu Pemerintahan	Bagian Program Studi Ilmu Pemerintahan
Volume :	
Nomor :	
Tahun :	
Halaman :	

KETIMPANGAN KEPEMILIKAN E-KTP DALAM PEMBANGUNAN DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL DIKECAMATAN MUARA BENGKAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

Sopiyana¹, I Ketut Gunawan², Anwar Alaydrus³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketimpangan kepemilikan E-KTP dalam pembangunan data kependudukan nasional di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian keperustakaan dan penelitian di lapangan yang dimana menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga data dan wawancara dilaksanakan. Dengan menggunakan analisis data kualitatif berdasarkan pendapat Miles, Huberman dan Saldana yang terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketimpangan Kepemilikan E-KTP Dalam Pembangunan Data Kependudukan Nasional Di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur masih belum merata dan banyak mengalami kendala yang dihadapi dalam penerapan E-KTP sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan E-KTP di beberapa desa Kecamatan Muara Bengkal. Upaya yang dilakukan pada proses penerapan E-KTP belum cukup optimal karena masih ada karena masih banyak kendala yang terjadi sehingga dalam proses penerapan E-KTP masih terhambat. Upaya yang dilakukan seperti pembaharuan data kependudukan secara berkala dan sosialisasi ke desa-desa dan sekolah-sekolah tentang pentingnya E-KTP berjalan dengan sangat baik. Sedangkan kendala yang terjadi dalam penerapan E-KTP adalah kesalahan data penduduk, mesin percetakan E-KTP yang kurang memadai, kekurangan blangko dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya E-KTP bagi identitas diri.

Kata kunci : *Ketimpangan, E-KTP, Pembangunan Data, Kependudukan*

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sopiyanaa16@gmail.com

²Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarm

Pendahuluan

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari aparatur. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kalimat di atas diperkuat lagi dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 yang menguraikan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Menurut Sinambela (2010:128) pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan, bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi telah berkembang lebih luas pada tatanan organisasi pemerintah.

Aparatur pemerintah dan seluruh jajarannya biasa dikenal sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dan secara sederhana peranan tersebut diharapkan dapat terwujud dalam pemberian berbagai jenis pelayanan bagi masyarakat. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mendapat dukungan penuh dari rakyatnya dalam hal ini, rakyat sangatlah berperan penting dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu sebagai wujud rasa terima kasih atas dukungan yang telah rakyat berikan terhap pemerintah, sudah semestinya pemerintah (melalui aparat birokrasi) memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat/publik.

Tata pemerintahan yang baik sangat bergantung pada perkembangan sektor publik. Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah, dan sangat terikat dengan hak setiap warga negara Indonesia. Menurut Masrin (2013:68), salah satu tanggung jawab pemerintahan umum adalah sistem administrasi kependudukan, yang dalam prakteknya sangat terikat dengan hak-hak sipil atau hak-hak sipil kependudukan.

Mekanisme tradisional pembuatan KTP di Indonesia yang memungkinkan seseorang memiliki banyak KTP menjadi dasar terciptanya e-KTP. Hal ini karena tidak ada satu pun database yang menghimpun informasi demografis dari setiap daerah di Indonesia. Fakta ini membuka peluang bagi warga negara yang ingin menipu pemerintah dengan menggunakan beberapa KTP.

Pembuatan e-KTP memiliki tantangan tersendiri, di antaranya masih ada sebagian masyarakat yang terus memfabrikasi e-KTP sehingga individu dapat memiliki banyak e-KTP sekaligus. Ini adalah masalah yang harus diselidiki pemerintah lebih dalam. Karena jika pengguna membuat e-KTP palsu, datanya tidak akan terekam dan mungkin akan dihapus.

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum di dalamnya Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup, hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2006, Pasal 13 UU tentang Administrasi Kependudukan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan administrasi yang tertib sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan untuk mencegah serta menutupi peluang adanya KTP ganda yang selama ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat yang dapat menyebabkan kerugian bagi negara.

Kerangka Dasar Teori

Ketimpangan kepemilikan E-KTP

Menurut KBBI timpang memiliki 3 arti. Timpang adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Ketimpangan adalah kepincangan dan celah, yang tidak sebagaimana mestinya seperti tidak adil, tidak seimbang, perbedaan yang begitu jauh, dan perbedaan antara peluang, proporsi, atau kepemilikan seseorang adalah tanda-tanda dari adanya ketimpangan.

Pengertian kepemilikan kata “kepemilikan” dalam bahasa Indonesia terambil dari kata “milik”. Kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa Arab “milk” menandakan bahwa sesuatu (barang atau aset) berada di bawah kendali individu, dan barang-barang ini, baik secara praktis maupun hukum, adalah milik mereka. Aspek kekuasaan ini tercermin dalam kenyataan bahwa seseorang yang memiliki sesuatu memiliki kendali atasnya, memungkinkannya untuk membatasinya sesuka hatinya dan mencegah orang lain secara individu atau institusional untuk mencegahnya memanfaatkannya. Di dalam masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa mempunyai kedudukan yang makin penting, dan kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.

Sebagai catatan demografis berdasarkan statistik kependudukan nasional, KTP elektronik mencakup sistem pengendalian keamanan baik dari segi administrasi maupun teknologi informasi. Mewujudkan kepemilikan identitas tunggal (KTP) bagi penduduk tunggal yang memiliki kode keamanan nasional dan rekam data kependudukan secara elektronik berdasarkan NIK (biodata, foto, sidik jari, iris mata, dan tanda tangan) yang tercatat dalam fisik Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah tujuan (E-KTP).

Ketimpangan Kepemilikan E-KTP adalah adanya ketidak seimbangan atau perbedaan dalam pembangunan tentang penerapan program E-KTP di seluruh penjuru Kota/Desa yang ada di Indonesia. Pentingnya penerapan E-KTP tersebut adalah agar mencegah adanya KTP palsu atau KTP ganda yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan dengan adanya E-KTP tersebut memudahkan bagi masyarakat Indonesia, selain untuk identitas jati diri, perbankan, pendidikan, dan lain-lain.

Pembangunan Data Kependudukan Nasional

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Ini dapat disimpulkan sebagai upaya sederhana untuk mengubah masa lalu yang malang menjadi zaman baru yang lebih menarik yang akan mewarisi masa depan. Dalam pembangunan terjadi rentetan bermacam perubahan yang mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pembangunan pada hakekatnya ialah proses perubahan yang terjadi secara terus menerus merupakan kemajuan yang ingin diraih.

Istilah pembangunan menunjukkan hasil proses pembangunan itu sendiri.

Data adalah kumpulan fakta atau informasi mentah yang telah dikumpulkan melalui observasi atau penelitian dan dapat berbentuk simbol, angka, frase, atau gambar. Menurut sudut pandang yang berbeda, data adalah sekelompok pernyataan atau deskripsi fundamental dari suatu entitas (suatu barang atau peristiwa) yang diperoleh melalui pengamatan (observasi), yang kemudian dapat diolah menjadi bentuk yang lebih rumit, seperti informasi, data, atau solusi untuk masalah tertentu.

Warga negara Indonesia maupun yang berasal dari negara lain yang telah menjadikan Indonesia tempat tinggal tetapnya dianggap sebagai penduduk. Kependudukan adalah masalah yang terkait dengan struktur, jumlah, umur, agama, jenis kelamin, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, distribusi, mobilitas, dan kualitas selain ketahanan, yang terkait dengan politik, masalah sosial, ekonomi, dan budaya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri dan meliputi bangsa. Istilah "Nasional" mengacu pada identitas yang terkait dengan kelompok yang lebih besar yang dihubungkan oleh kesamaan, termasuk yang berwujud seperti budaya, agama, dan bahasa serta yang tidak berwujud seperti harapan dan tujuan.

Pembangunan Data Kependudukan Nasional bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses data kependudukan dan memanfaatkannya untuk mendukung penyelenggaraan kependudukan, penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien, penyelenggaraan pemilu, efisiensi pemilihan kepala daerah, dan pada akhirnya menjadi data dasar bagi Pembangunan Data Kependudukan Nasional.

Ketimpangan Kepemilikan E-KTP Dalam Pembangunan Data Kependudukan Nasional

E-KTP dalam penerapannya tentu saja memiliki perkembangan dalam pelaksanaannya. Berangkat dari masalah adanya ketimpangan E-KTP pemerintah mencoba beberapa cara untuk mengatasi ketimpangan E-KTP. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba melusuri sejauh mana perkembangan pendataan dan kepemilikan E-KTP di Kecamatan Muara Bengkal.

Seiring berjalannya waktu dalam penerapan E-KTP tentu saja menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang terjadi ialah Ketimpangan Kepemilikan E-KTP, Ketimpangan adalah timpang/ketidak seimbangan dalam sebuah data atau pembangunan. Menurut data yang penulis ambil, pada tahun 2018 menyatakan adanya ketimpangan kepemilikan E-KTP yang cukup besar di beberapa desa di Kecamatan Muara Bengkal. Maka dari itu, penelitian ini akan menelaah lebih dalam mengenai Peta Ketimpangan Kepemilikan E-KTP di Kecamatan Muara Bengkal.

Dalam pelaksanaan penerapan E-KTP mengalami beberapa masalah yang terjadi, seperti ketimpangan kepemilikan E-KTP. Ketimpangan sendiri dapat diartikan sebagai ketidak seimbangan, dalam penerapan E-KTP di Kecamatan Muara Bengkal menemui beberapa desa yang mengalami ketimpangan e-ktp dengan berbagai alasan yang membuat terjadinya ketimpangan tersebut. Peneliti akan mencoba mengkaji lebih dalam terkait mengapa ketimpangan kepemilikan E-KTP terjadi di Kecamatan Muara Bengkal.

Dalam pelaksanaan penerapan E-KTP tidak serta merta hanya tentang hambatan dan ketimpangan yang terjadi, namun juga ada gagasan dan upaya dari pemerintah Kecamatan dalam mensukseskan penerapan E-KTP di Kecamatan Muara Bengkal. Dalam permasalahan E-KTP di Kecamatan Muara Bengkal tidak di pungkiri terdapat beberapa ketimpangan kepemilikan E-KTP, dalam hal ini pemerintah telah menerapkan beberapa upaya agar dapat mengatasi ketimpangan E-KTP dan melihat sejauh mana tingkat keberhasilannya. Penelitian ini akan melihat seberapa jauh upaya pemerintah kecamatan dalam mengatasi ketimpangan E-KTP dan mengukur tingkat keberhasilannya di Kecamatan Muara Bengkal.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan datanya. Penelitian ini dipilih karena memberikan data secara nyata, akurat, dan metodis atas fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Ketimpangan Kepemilikan E-KTP pada Data Pembangunan Kependudukan Nasional di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu topik yang akan diteliti dalam penelitian ini, yang akan menggunakan desain penelitian deskriptif dan akan mengambil metode kualitatif.

Agar ruang lingkup perbincangan ini tetap terkendali, kajian kali ini akan fokus pada ketimpangan kepemilikan E-KTP dalam proses penyusunan data kependudukan nasional di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, penulis terfokus pada :

1. Peta ketimpangan kepemilikan di kecamatan muara bengkal
2. Sebab-sebab ketimpangan kepemilikan terjadi dalam pelaksanaan pembangunan E-KTP di kecamatan muara bengkal
3. Upaya-upaya pemerintah kecamatan muara bengkal dalam mengatasiketimpangan E-KTP dan tingkat keberhasilannya.

4. Perkembangan pendataan dan kepemilikan E-KTP dalam pembangunan data kependudukan Nasional di kecamatan muara bengkal.

Hasil Penelitian

Peta Ketimpangan Kepemilikan di Kecamatan Muara Bengkal

Pada tahun 2012 Kecamatan Muara Bengkal juga melakukan penerapan program E-KTP (Ktp-el), dari awal sampai saat ini diterapkan nya program E-KTP ini sudah banyak kendala yang terjadi yang membuat percetakan E-KTP mengalami banyak hambatan dan terjadinya ketimpangan besar di beberapa daerah di kecamatan. Peta ketimpangan daerah-daerah yang memiliki nilai ketimpangan yang lebih tinggi dari desa yang lainnya. Kecamatan Muara Bengkal terdiri dari 7 (tujuh) desa di antaranya Desa Mulupan, Desa Senambah, Desa Ngayau, Desa Muara Bengkal Ilir, Desa Muara Bengkal Ulu (Ibu kota kecamatan) dan Desa Batu balai.

1. Desa Mulupan desa yang paling jauh dari kecamatan jarak tempuh dari desa ke kecamatan sekitar 2-3 jam jalur darat tetapi jika hujan waktu yang akan ditempuh akan lebih lama lagi dan jika melalui jalur air akan memakan waktu yang lebih lama lagi dan tidak semua orang mempunyai ketinting. Untuk menunggu jemputan mobil dari kecamatan pun tidak setiap hari datang dan jika mobil truk datang menjemput masyarakat untuk melakukan perekaman E-KTP harus berdesak-desakkan membuat sebagian masyarakat tidak ingin pergi. Jumlah yang belum mempunyai KTP di Desa Mulupan 644 jiwa dari 266 Kartu Keluarga (KK).
2. Desa Senambah desa yang paling jauh setelah Desa Mulupan jarak tempuh dari desa ke kecamatan sekitar 1-2 jam jalur darat jika hujan waktu yang di tempuh akan menjadi lebih lama jika menggunakan jalur air pun waktu yang di tempuh hampir lebih lama lagi. Desa senambah juga memiliki kendala yang hampir sama dengan Desa Mulupan yaitu terkendala dengan jarak dan jalanan yang rusak yang membuat perekaman E-ktp menjadi terhambat. Jumlah yang belum mempunyai E-KTP di Desa Senambah 1,222 jiwa dari 492 Kartu Keluarga (KK).
3. Desa Ngayau desa yang terbilang cukup dekat dengan kecamatan dengan jarak tempuh dari desa ke kecamatan sekitar 15-20 menit jalur darat, jaman dulu jika ingin ke kecamatan sangat sulit karena jalan yang rusak apabila hujan tetapi sekarang jalanan sudah diperbaiki sehingga membuat sangat mudah melakukan akses perjalanan. Untuk Desa Ngayau sendiri tidak ada kendala berlebih yang dihadapi untuk pergi melakukan perekaman di kecamatan hanya saja kurangnya kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya E-KTP bagi identitas diri. Jumlah yang belum mempunyai E-ktp 1,008 jiwa dari 446 Kartu Keluarga (KK).
4. Desa Muara Bengkal Ilir sangat dekat dengan kecamatan dengan jarak tempuh dari desa ke kecamatan sekitar 5-10 menit jalur darat. Untuk Desa

- Muara Bengkal Ilir sendiri tidak ada kendala dalam hal melakukan perekaman E-KTP hanya kurangnya kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya E-KTP bagi identitas diri dan masalahnya yang dihadapi hampir sama dengan Desa Ngayau. Jumlah yang belum mempunyai E-KTP 1,229 jiwa dari 501 Kartu Keluarga (KK).
5. Desa Muara Bengkal Ulu (ibu kota kecamatan) dengan jarak tempuh dari desa ke kecamatan sekitar 5-10 menit jalur darat. Untuk Desa Muara Bengkal Ulu sendiri tidak ada kendala yang dialami dalam hal melakukan perekaman E-KTP hanya saja masalah yang dihadapi hampir sama dengan Desa Ngayau dan Desa Muara Bengkal Ilir yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya E-KTP bagi identitas diri. Jumlah yang belum mempunyai E-ktp 1.540 jiwa dari 678 Kartu Keluarga (KK).
 6. Desa Benua Baru yang terbilang cukup dekat dengan kecamatan dengan jarak tempuh dari desa ke kecamatan sekitar 10-15 menit jalur darat, untuk Desa Benua Baru sendiri desa yang cukup besar dari desa lainnya dan akses jalan ke kecamatan pun terbilang sangat lancar tidak menemui kendala apapun dalam hal melakukan perekaman E-KTP hanya saja masalah yang dihadapi masih sama dengan Desa Ngayau, Desa Muara Bengkal Ilir dan Desa Muara Bengkal Ulu yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap akan pentingnya E-KTP bagi identitas diri. Jumlah yang belum mempunyai E-ktp 3.385 jiwa dari 1,328 Kartu Keluarga (KK).
 7. Desa Batu Balai cukup jauh dari kecamatan dengan jarak tempuh dari desa ke kecamatan sekitar 30-1 jam jalur darat apabila menggunakan jalur air akan lebih lama lagi, untuk Desa Batu Balai kendala yang di hadapi dalam melakukan perekaman E-ktp ialah terkendala dengan keadaan jalan yang rusak dan apabila hujan jalan akan bertambah rusak dari sebelumnya dan jika menunggu mobil truk dari kecamatan datang menjemput untuk melakukan perekaman E-KTP masalahnya sama saja harus menunggu jalan kembalikering dalam beberapa hari. Jumlah yang belum mempunyai E-KTP 1,070 jiwa dari 422 Kartu Keluarga (KK).

Sebab-sebab Ketimpangan Kepemilikan Terjadi Dalam Pelaksanaan Pembangunan E-ktp di Kecamatan Muara Bengkal

Dalam proses penerapan E-KTP yang sampai saat ini berjalan masih banyak dijumpai beberapa permasalahan. Permasalahan yang dihadapi :

- a. Terdapat kesalahan data penduduk.
Saat melakukan perekaman data E-KTP di kantor Kecamatan Muara Bengkal, operator akan menanyakan kebenaran informasi kepada masyarakat sebelum melanjutkan ke tahap pencatatan selanjutnya. E-name, tempat KTP, tanggal lahir, alamat, dan status sering salah diisi karena operator kelelahan, yang terkadang disebabkan oleh banyaknya penduduk yang harus bersaing dengan kapasitas operator yang terbatas dan prosedur

pelunasan larut malam.

b. Aktivasi E-KTP.

E-KTP yang telah dicetak harus diaktifkan terlepas dari apakah informasi yang disajikan akurat. Namun demikian, ada warga atau pegawai pemerintah tertentu yang dilarang membagikan E-KTP dan tidak dilakukan aktivasi terlebih dahulu karena begitu E-KTP tersebut sudah selesai maka akan langsung diserahkan kepada pihak desa/kelurahan dan pihak desa/kelurahan bisa memberikannya E-KTP pada pihak yang bersangkutan agar bisa melakukan aktivasi sendiri ke kantor kecamatan agar data pada E-KTP terkunci dengan aman. Tetapi banyak penduduk yang memiliki jarak yang jauh dari kantor pemerintahan dan enggan melakukan aktivasi, dengan tidak dilakukannya aktivasi akan membuat kesalahan pada data E-KTP seperti NIK yang tidak terdaftar dalam mengurus layanan perbankan.

c. Kesalahan foto dengan data yang tercantum.

Hal ini dikarenakan adanya kesalahan dalam perekaman E-KTP yang membuat yang bersangkutan harus melakukan perekaman ulang karena data yang tidak sesuai dan karena operator keliru memasukkan data penduduk pada saat proses perekaman data untuk E-KTP maka data tersebut tidak akan bisa diproses di kantor pusat sehingga harus melakukan perekaman ulang.

d. Putusnya jaringan komunikasi dan kerusakan alat perekam pada saat melakukan perekaman E-KTP maka operator akan mengirim data pada kantor pusat agar data dapat diproses sehingga dapat tercetak dengan sebaiknya, tetapi ketika melakukan pengiriman ke kantor pusat biasanya ditengah-tengah pengiriman data sering terjadi kerusakan jaringan dan gangguan jaringan sehingga E-KTP yang akan tercetak pada hari tersebut menjadi terhambat dan tidak hanya jaringan tetapi juga seringnya rusak peralatan perekaman seperti pemindai retina mata dan sidik jari serta masalah lainnya yang menyebabkan terhentinya penyelenggaraan layanan perekaman E-KTP.

e. Kurangnya Blangko

Jumlah blangko yang diberikan pemerintah tidak mencukupi dengan banyaknya masyarakat. Pemerintah hanya memberikan Blangko sebanyak 4000 keping kepada kabupaten tetapi pihak kabupaten hanya menyerahkan 500 keping pada setiap kecamatan yang ada dan apabila kehabisan blangko maka pihak kecamatan hanya bisa memberi Surat Keterangan Pengganti E-ktp.

Upaya-upaya Pemerintah Kecamatan Muara Bengkal Dalam Mengatasi Ketimpangan E-ktp dan Tingkat Keberhasilannya

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Kecamatan Muara Bengkal dalam upaya pemecahan masalah ketimpangan pembangunan E- KTP. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam proses pembangunan E-KTP di

Kecamatan Muara Bengkal, Kebutuhan masyarakat saat ini akan pelayanan publik yang besar akan semakin meningkat. Oleh karena itu, legitimasi pemerintah sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengatasi hambatan yang ada sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya disparitas dalam pengembangan E-KTP. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Kecamatan Muara Bengkal melaksanakan upaya pemecahan masalah ketimpangan E-KTP sebagai berikut :

1. Pembenahan Lingkungan Internal

Pembenahan lingkungan internal ialah pembenahan yang dilakukan didalam ruang lingkup Kecamatan Muara Bengkal melakukan pengecekan terhadap alat-alat pendukung percetakan E-KTP seperti upaya yang dilakukan dibawah ini :

- a. Berusaha untuk melakukan pembaharuan data kependudukan secara berkala minimal 1 (satu) bulan sekali dan tepat waktu pada pihak pemerintah pusat agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiputan data.
- b. Melakukan pemeliharaan *Software* (perangkat lunak) dan *Hardware* (perangkat keras) alat pendukung perekaman KTP elektronik secara berkala :
 - Perawatan software (perangkat lunak) adalah untuk melindungi sistem operasi komputer terhadap apa pun yang dapat merusak integritasnya. Barang-barang tersebut seperti sisa sampah dari instalasi, malware, dan hal lain yang dapat membahayakan perangkat lunak (software) lainnya.
 - Perawatan *hardware* (perangkat keras) Membersihkan komputer dari segala sesuatu yang dapat merusak periferal itu sendiri, seperti debu yang menempel yang dapat menghalangi penggunaan periferal (perangkat tambahan), bahkan jika dibiarkan, akan merusak periferal itu sendiri. Peripherals atau perangkat tambahan ialah perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu pekerjaan. Beberapa perangkat yang umum digunakan adalah printer, keyboard, mouse, speakers dan port adapter.
2. Melaksanakan pemeliharaan jaringan KOMINFO secara berkala untuk memastikan lancarnya konektivitas pelayanan kependudukan di kecamatan
3. Melakukan pemeriksaan minimal 1 (satu) minggu 1 (satu) kali pengecekan karena jaringan KOMINFO (komunikasi dan informatika) sekarang ini digunakan untuk mengirim data kependudukan ke Disdukcapil agar tidak terjadi kendala kerusakan saat mengirim data.
4. Melaksanakan Bimtek (bimbingan teknis) bagi pegawai serta mengikutsertakan dalam pelatihan profesional maupun pelatihan bidang kependudukan dan pencatatan sipil

Pembenahan Lingkungan Eksternal

Pembenahan lingkungan eksternal ialah pembenahan yang dilakukan di luar ruang lingkup Kecamatan Muara Bengkal melakukan sosialisai ke sekolah- sekolah terhadap pentingnya E-KTP seperti upaya yang dilakukan dibawah ini :

- a. Mengupayakan perekaman E-KTP di kantor Desa/Kelurahan sehingga jaraknya mudah dijangkau masyarakat.
- b. Upaya ini dilakukan agar memudahkan masyarakat yang berada jauh dari kecamatan agar lebih mudah melakukan perekaman dan lebih menghemat biaya.
- c. Mengupayakan penggunaan mobil keliling untuk pelayanan yang jauh dari Kantor kecamatan, Melaksanakan Pelayanan Jemput Boleh (JEMBOL) ke desa-desa.
- d. Upaya ini juga sama seperti upaya yang sebelumnya tetapi yang membedakan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dengan mendatangi rumah-rumah warga yang belum melakukan perekaman E-ktp dan di rekam di cetak di kecamatan.
- e. Upaya perekaman E-KTP ke sekolah-sekolah, bagi siswa yang tahun depan akan wajib KTP.

Perkembangan Pendataan dan Kepemilikan E-ktp di Dalam pembangunan Data Kependudukan Nasional di Muara Bengkal

1. KTP Jaman Penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan Belanda ini, KTP diberlakukan. Sebelumnya, KTP dikenal dengan sebutan “Surat Keterangan Penduduk”. Sertifikat kependudukan ini diberikan oleh seorang pejabat Hindia Belanda yang dikenal dengan nama Hoofd Van Plaatselijk atau kepala pemerintahan daerah. Secara historis, KTP dicetak pada selembar kertas berukuran 15x10 sentimeter. Seseorang harus membayar pajak sebesar 1,5 gulden, atau sekitar Rp 9.700 dengan kurs saat ini, untuk menerima tanda pengenal ini.

2. KTP Jaman Penjajahan Jepang

Pada saat Jepang menjajah Indonesia dan menggantikan kependudukan Belanda mengubah metode manajemen populasi Indonesia. Mengganti KTP dengan KTP baru adalah salah satu strategi mereka. KTP Jepang dikenal sebagai KTP Propaganda karena yang memegangnya pada hakikatnya adalah mengikrarkan kesetiannya kepada golongan penguasa Jepang di seluruh nusantara. Berkenaan dengan pernyataan identitas pemilik di balik halaman, KTP versi Jepang berbeda secara signifikan dari KTP era kolonial Belanda di mana versi Jepang memiliki materi propaganda yang secara halus memaksa pemilik KTP untuk bersumpah setia kepada kolonialisme Jepang.

3. KTP di Awal-awal Kemerdekaan

Dalam kurun waktu tersebut, KTP juga disebut sebagai Surat Keterangan Kewarganegaraan Indonesia. Kartu ini diproduksi di atas kertas yang belum dilaminasi. Kartu ini berlaku dari tahun 1945 hingga 1977, dan sebagian besar tulisan di dalamnya menggunakan mesin tik; Namun, sebagian darinya ditulis tangan. Selama kurun waktu tersebut, kartu identitas yang digunakan di setiap wilayah Indonesia berbeda satu sama lain. Orang-orang saat itu

akan menyimpan kartu identitas mereka di sarung tangan kulit.

4. KTP Periode 1967-1970

Ketika Indonesia mencapai kemerdekaannya dari Belanda, sertifikat penduduk diganti dengan sertifikat kewarganegaraan Indonesia. Kartu ini, yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan dan sebagian ditulis menggunakan mesin tik dan sebagian dikerjakan dengan tangan, diperlukan antara tahun 1945 - 1977..

5. KTP Periode 1970-1977

Dalam kurun waktu tersebut, desain KTP dimutakhirkan dengan menyertakan cover berupa hard cover. Meskipun formulir tersebut telah mengalami perubahan yang signifikan sejak periode 1967-1970, namun isi dan informasi yang tercantum dalam KTP tetap sama dengan versi sebelumnya (periode 1967-1970).

6. KTP Laminasi

Itu berlangsung dari tahun 1978 hingga 2003. Kemudian, prangko asli, pengawasan, validasi, dan verifikasi dari tingkat terendah RT/RW diterapkan pada kertas kosong sebelum dilaminasi dengan plastik. Dilampirkan gambar, nomor urut unik, tanda tangan, dan cap jempol, dan dokumen tersebut hanya berlaku di Kabupaten/Kota.

7. KTP Kuning Periode 2002-2004

Jika dibandingkan dengan KTP sebelumnya, KTP berikutnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Satu-satunya perbedaan adalah lembar data identitas pemilik menjadi kuning. Serupa dengan ketentuan sebelumnya, Lurah menandatangani KTP milik warga Jakarta. Sedangkan KTP warga yang berdomisili di luar Jakarta disahkan oleh camat masing-masing.

8. KTP Darurat Militer Aceh

Aceh memiliki desain KTP yang berbeda dengan daerah Indonesia lainnya ketika memasuki masa Darurat Militer Aceh tahun 2003. KTP Merah Putih adalah nama lain dari KTP ini. Dengan bendera merah putih dan lambang Garuda, KTP ini berbeda dengan KTP sebelumnya dalam berbagai hal. Dandim dan Kapolsek sama-sama menandatangani KTP ini di belakang selain camat yang menyetujuinya. Penggunaan KTP ini sempat dihentikan pada tahun 2004 dengan berakhirnya perang Aceh.

9. KTP Nasional

Selama ini, KTP disebut sebagai KTP Nasional karena tidak ada variasi warna atau simbol yang digunakan dari satu daerah ke daerah lain. KTP khusus ini dibuat dengan bahan dasar plastik, dan berlaku dari tahun 2004 sampai dengan 2010. Pemantauan KTP ini dimulai dari RT/RW dan dilanjutkan ke tahap-tahap setelahnya. Berbeda dengan KTP versi sebelumnya, KTP ini berlaku di seluruh Indonesia.

10. KTP Elektronik (E-KTP)

KTP ini banyak terobosan-terobosan baru, mulai dari bahan PVC/PC,

pengawasan dan pengesahan verifikasi dari tingkat RT/RW terbawah dan seterusnya. KTP Elektronik (E-KTP) diperkenalkan pada tahun 2011, dan merupakan kependekan dari "Electronic Knowledge Transfer Program". Format KTP belum diubah secara signifikan dari iterasi sebelumnya secara signifikan. Meski demikian, ruang penyimpanan data berupa microchip dimasukkan ke dalam KTP ini. Karena KTP ini menggunakan mekanisme pendampingan yang akurat, maka dapat diterapkan dalam skala global. Informasi tersebut dicetak dengan bantuan komputer dan nomor seri yang unik. KTP ini juga berlaku di seluruh negeri dan memiliki sejumlah aplikasi potensial.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peta ketimpangan kepemilikan E-KTP Kecamatan Muara Bengkal masih terdapat beberapa desa yang mengalami ketimpangan karena terkendala pada proses percetakan E-KTP yang membutuhkan waktu kurang lebih 12 jam untuk 1(satu) E-KTP, dan jarak tempuh. Dilihat dari peta wilayah dan jumlah penduduk yang wajib E-KTP di Kecamatan Muara Bengkal.
2. Adapun sebab-sebab terjadinya ketimpangan kepemilikan E-KTP di Kecamatan Muara Bengkal dikarenakan ada beberapa kendala seperti kesalahan data penduduk, rusaknya jaringan di tengah-tengah proses pengiriman data dan kehabisan blangko. Kendala yang terjadi saat ini dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap proram E-KTP yang berada di pelosok-plosok desa.
3. Untuk mengatasi ketimpangan E-KTP pemerintah menerapkan upaya-upaya yang dapat mengatasi hambatan dalam proses pembangunan E-KTP, upaya yang di terapkan seperti melakukan pembaharuan data kependudukan secara berkala, melakukan pemeliharaan software dan hardware, melakukan pembersihan jaringan KOMINFO, melaksanakan bimtek, mengupayakan perekaman E-KTP di kantor desa/kelurahan, mengupayakan mobil keliling untuk perekaman E-KTP bagi desa yang jauh dan melakukan sosialisai ke sekolah yang tahun depan wajib KTP. Dengan adanya upaya disinyalir dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi dari dampak yang di sebabkan oleh kendala yang di timbulkan dalam penerapan pembangunan E-ktp.
4. Perkembangan E-KTP di Kecamatan Muara Bengkal mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan, karena dilihat dari semangat pemerintah yang terus berupaya agar bisa mensukseskan program E-ktp di Kecamatan Muara Bengkal sampai saat ini pemerintah masih terus berupaya agar perkembangan pembangunan pendataan dan kepemilikan E-ktp terus berjalan dengan baik tentunya tidak mudah bagi pemerintah untuk mensukseskan program E-ktp ini terbilang dari tahun 2012 hingga tahun 2022 program E-ktp ini banyak menuai pro dan kontra dari masyarakat.

Saran

1. Oleh karena itu dengan adanya ketimpangan pada beberapa desa diharapkan agar pemerintah lebih tanggap lagi dalam menangani beberapa desa yang ketimpangannya cukup besar, maka penulis menyarankan agar pemerintah bisa melakukan penjemputan pada masyarakat yang berada jauh dari Kecamatan Muara Bengkal.
2. Mengingat masih banyaknya kendala yang terjadi di dalam program pembangunan E-KTP di Kecamatan Muara Bengkal maka penulis menyarankan, agar pemerintah bisa lebih cepat menangani setiap permasalahan yang timbul misalnya melakukan pengecekan ulang pada data yang akan dikirim agar tidak terjadi kesalahan dalam percetakan, rutin melakukan pengecekan jaringan agar dapat mencegah terjadinya kerusakan, juga terhadap kasus blangko yang sering habis penulis menyarankan agar pemerintah setempat cepat mengajukan permintaan blangko sebelum blangko yang ada sudah habis terpakai agar tidak terjadi penumpukan rekaman E- KTP.
3. Oleh karena itu dengan adanya upaya yang telah dilakukan pemerintah Kecamatan Muara Bengkal dalam mengatasi penyebab terjadinya ketimpangan E-KTP maka penulis mengarpakan, agar upaya yang telah diterapkan berjalan dan berkembang dengan baik. Penulis juga mengharapkan agar pemerintah dapat melakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan mengupayakan sosialisasi pada masyarakat akan pentingnya E-KTP bagi identitas diri.
4. Mengingat perkembangan pembangunan pendataan kepemilikan E-ktp di Kecamatan Muara Bengkal saat ini mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya maka diharapkan pemerintah untuk dapat mempertahankan kinerja tersebut agar dapat mensukseskan program pembangunan data kepemilikan di Kecamatan Muara Bengkal dan mencari solusi untuk segera menyelesaikan permasalahan ketimpangan pembangunan E-ktp di Kecamatan Muara Bengkal.

Daftar Pustaka

Buku

- Ndraha, Taliziduhu. 2007. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Penerbit Yayasan Karya.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Brata kusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Riyadi, Slamet. 2006. *Banking Assets And Liability Management*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. MedPres. Yogyakarta

Dokumen-Dokumen

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan